

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

SURYAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi jaminan fidusia. *Teori yang digunakan*, adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori pidana dan pemidanaan. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. *Hasil penelitian*, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan hukum terhadap jaminan fidusia, khususnya terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya terhadap sertifikat jaminan fidusia, tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun harus dimaknai siapakah yang dinyatakan telah melakukan cidera janji, dan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia akibat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka jalur pengadilan perdata yang akan dapat menentukan siapa yang dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila objek jaminan fidusia ternyata telah dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga atau penadah, maka dapat dipastikan debitur tidak dapat menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela, dan bagaimanakah cara menjerat hukum bagi pihak penadah yang objeknya adalah benda jaminan fidusia, sedangkan secara yuridis normatif dalam ketentuan khusus di Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang penadah atau penadahan, sehingga dalam penelitian ini berpadangan hukum perlunya adanya revisi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memuat ketentuan tentang penadahan. *Simpulan*, Dasar tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia adalah Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan jika benda objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 372 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia tidak dapat dipidana, terkecuali objek penadahan berasal dari penggelapan Pasal 372 KUHP yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia dengan didasarkan Pasal 480 KUHP serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada *Judicial Review* eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata kunci: jaminan fidusia, penadahan

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL
CONDITIONERS OF OBJECT TRENDING
GUARANTEE FIDUSIA (Study of Court Decisions
Indonesian Constitution Number 18 / PUU-XVII / 2019)**

SURYAN

ABSTRACT

This study aims to identify and explain about criminal regulation for criminal offenders who transfer fiduciary security based on the provisions of the applicable laws. And to find out and explain about law enforcement efforts against the perpetrator of detention of objects that become fiduciary guarantees. The theory used is the theory of rule of law, theory of law enforcement, and the theory of crime and punishment. The research method used is a juridical analysis method with a qualitative approach. The results of the research, the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18 / PUU-XVII / 2019 on January 6, 2020 had a significant impact on legal issues on fiduciary guarantees, particularly on the provisions of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law which in essence is the fiduciary guarantee certificate. , does not necessarily have executorial power like a court decision having permanent legal force, but it must be interpreted who is found to have committed a breach of contract, and if the debtor does not voluntarily hand over the object of fiduciary collateral due to inability to make payment obligations to the creditor, then the civil court route will be able to determine who is declared in default, but if the fiduciary security object turns out to have been transferred, traded, leased or pawned to a third party or collector, then it can be ascertained that the debtor cannot submit the object of the fiduciary guarantee to the creditor effectively. karela, and how to ensnare the law on fiduciary parties whose object is a fiduciary security object, while juridically normative in the special provisions of the Fiduciary Guarantee Law and in legal consideration of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 there is no single provision that regulates the fiduciary or detention, so that in this research the legal opinion is that there is a need for a revision in the Fiduciary Guarantee Law to contain provisions on detention. Conclusion, The basis for the criminal charges filed against the debtor in terms of transferring or transferring, pawning, renting the object of fiduciary security that has been registered with the fiduciary guarantee agency is Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and if the object of fiduciary security is not registered with The Fiduciary Guarantee Institution is a general crime as regulated in the 372 Criminal Code. Law enforcement for the detention of fiduciary collateral objects cannot be convicted, with the exception of the object of detention originating from embezzlement of Article 372 of the Criminal Code whose fiduciary guarantee is not registered with the Fiduciary Guarantee Institution based on Article 480 of the Criminal Code and in the Constitutional Court Decision only focuses on the Judicial Review of the execution of the fiduciary guarantee object.

Key words: fiduciary guarantee, containment